

# IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN DALAM KURIKULUM 2013 DI SMA NEGERI 2 PEKANBARU

Oleh:

**Zulian Vina Kurnia Kastina**

**Email : [zulianvinna@gmail.com](mailto:zulianvinna@gmail.com)**

**Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Sujianto, M.Si**

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Panam JL.H.R.Soebrantas Km. 12,5 Simp.Baru Pekanbaru  
28293, Telp/fax (0761)63277

## ***Abstract***

*Implementation of assessment system of curriculum 2013 in Senior High School 2 Pekanbaru experiencing various problems because teachers and students are still not understand the assessment standards in curriculum 2013 due to the complicated and many assessment aspects, next still intertwined limited communication between the government and the school about assessment scale and the government still often changing regulations on the assessment system. The purpose of this research was to analyze how the implementation of assessment system of the curriculum 2013 at the Senior High School 2 pekanbaru and the factors that influence the implementation of assessment system of the curriculum 2013.*

*This research using Van Meter and Van Horn theory which states that the successful implementation of a policy is the standart and policy objectives, resources, characteristic of the implementing organization, the communication between organization, the attitude of the implementing policies and social environment, economic and political. The method used is descriptive qualitative methods. Techniques of collecting data through observation, interviews and documentation, and techniques of analysis data through interactive analysis model by Miles and Huberman.*

*The result showed that the implementation of assessment system of curriculum 2013 in Senior High School 2 Pekanbaru has not been done well and optimally because there are still many problems in the assessment system of curriculum 2013 is implemented in senior high school 2 pekanbaru. There are several factors that affecting the implementation of assessment system of curriculum 2013 in Senior High School 2 Pekanbaru has not been done well and optimally is the human resources, the attitude of the implementers and policy objectives and communication between implementers.*

***Key Words: Implementation, Assessment System of Curriculum 2013, Senior High School***

## PENDAHULUAN

Perubahan kurikulum dalam proses pengembangan pendidikan selalu mengalami penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Pengertian kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 butir 19 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia telah mengalami sembilan kali perubahan dan perbaikan kurikulum, mulai dari kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), 2006 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hingga Kurikulum 2013. Perubahan kurikulum tersebut di dasari pada perkembangan dan perubahan berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, serta kebangkitan industri kreatif dan budaya.

Ketentuan atas pengembangan kurikulum diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang didalam perubahannya terdapat tambahan Bab XI A tentang ketentuan yang mengatur tentang poin-poin pengembangan kurikulum.

Sebagaimana substansi yang terkandung didalam poin-poin pengembangan kurikulum tersebut maka kebijakan ini menandai terjadinya perubahan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 yang sebelumnya dipakai

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di tiap satuan pendidikan menjadi kurikulum 2013.

Terkait pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2013, maka terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum yang dimana dalam peraturan ini menandai di mulainya pelaksanaan kurikulum 2013.

Kurikulum 2013 dirancang dengan tujuan untuk mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, kemudian menjadikan peserta didik sebagai warga negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kurikulum 2013 pada dasarnya menekankan pada pembelajaran siswa aktif dengan pendekatan *scientific* dan penilaian autentik. Pendekatan *scientific* yaitu proses pembelajaran yang di rancang agar peserta didik aktif dalam pembelajaran melalui tahapan, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan dan mengomunikasikan konsep atau prinsip yang ditemukan. **Kurniasih dan Sani (2014:29)**

Sedangkan penilaian autentik (*Authentic Assessment*) adalah penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjamin Mutu Pendidikan (2014:87)**

Secara nasional pelaksana kurikulum 2013 adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang mana menetapkan kurikulum 2013 di mulai pada tahun ajaran 2013/2014. Lalu ditingkat provinsi dan kabupaten/kota pelaksana kurikulum 2013 adalah Dinas Pendidikan. Sementara di tingkat mikro, lembaga pelaksana kurikulum 2013 adalah sekolah, karena sekolah merupakan unit pelaksana terkecil yang langsung mengimplementasikan kurikulum 2013. Sasaran pelaksanaan kurikulum 2013 adalah guru dan siswa.

Salah satu hal yang mengalami perubahan dan perkembangan dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum 2013 adalah pada sistem penilaian. Perbedaan mendasar yang terjadi pada sistem penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya adalah pada KTSP 2006 standar penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan dan penilaian menganut prinsip penilaian berkelanjutan dan komprehensif guna mendukung upaya memandirikan siswa untuk belajar, bekerja sama dan menilai diri sendiri, karena itu penilaian dilaksanakan dalam kerangka penilaian berbasis kelas (PBK). Sedangkan pada kurikulum 2013 sistem penilaian yang digunakan adalah penilaian autentik. Penilaian

autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan secara terpadu.

Ketentuan mengenai sistem penilaian kurikulum 2013 diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu :

- a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.
- b. Lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.
- c. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

Sebagaimana kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka kurikulum 2013 di implementasikan mulai dari bulan Juli tahun 2013 di setiap satuan pendidikan di Indonesia.

Sampai saat ini sudah 6.221 sekolah dari jumlah total seluruh sekolah di seluruh Indonesia yaitu 208.000 sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) yang terdiri dari 2.598 SD, 1.473 SMP, 1.165 SMA, dan 1.021 SMK yang tersebar di 295 kabupaten dan kota diseluruh Indonesia menerapkan kurikulum 2013.

Meskipun kurikulum 2013 telah di hentikan sementara oleh pemerintah namun pada kenyataannya masih ada beberapa sekolah yang menerapkan kurikulum 2013 hingga saat ini. Salah satu daerah yang masih menerapkan kurikulum 2013 adalah Kota Pekanbaru. Di Kota Pekanbaru sendiri masih ada beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta yang menerapkan. Sekolah-sekolah tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel.1.1. Sekolah Menengah Atas (SMA) yang Menerapkan Kurikulum 2013 di KotaPekanbaru**

No	Nama Sekolah	Alamat
1	SMA Negeri 1 Pekanbaru	Jl. Sultan Syarif Kasim No. 159
2	SMA Negeri 8 Pekanbaru	Jl. Abdul Muis No. 14
3	SMA Negeri 2 Pekanbaru	Jl. Nusa Indah No. 4
4	SMA Negeri 6 Pekanbaru	Jl. Bambu Kuning No. 28
5	SMA Negeri 12 Pekanbaru	Jl. Garuda Sakti Km 3
6	SMA Babussalam	Jl. H.R Soebrantas Km 9
7	SMA Cendana Pekanbaru	Jl. Komplek Palembang, Rumbai
8	SMA Plus Provinsi Riau	Jl. Kubang Raya

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2015

Meskipun kurikulum 2013 telah di terapkan oleh beberapa sekolah namun

dalam pelaksanaannya masih di temukan kendala terutama dalam sistem penilaian. Sistem penilaian yang banyak serta rumit pada kurikulum 2013 membuat masih terjadi sikap penolakan dari peserta didik dan guru yang merasa mengeluh dan kesulitan, dimana sistem penilaian dalam kurikulum 2013 ini menggunakan tiga aspek penilaian yaitu pada sikap, pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, di tambah lagi dengan instrumen penilaian yang cukup banyak serta belum bakunya peraturan dalam sistem penilaian sehingga selalu mengalami perubahan oleh pemerintah. Hal inilah yang masih menjadi kendala yang dalam penerapan kurikulum 2013 di sekolah.

Berdasarkan uraian di yang dipaparkan di atas, maka diidentifikasi bahwa fenomena dalam implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru yaitu :

1. Adapun masih terjadi sikap penolakan dari sasaran sistem penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu peserta didik. Dimana dalam hal ini beberapa peserta didik masih kontra dengan sistem penilaian dalam kurikulum 2013 dikarenakan penilaian yang banyak membebani peserta didik dengan aspek-aspek yang rumit.
2. Dari guru sendiri sebagai pelaksana sistem penilaian dalam kurikulum 2013, dalam hal ini masih terjadi ketidaksiapan guru dalam mengimplementasikan sistem penilaian dalam kurikulum 2013.
3. Sementara itu dari segi organisasi sekolah selaku implementor

kurikulum 2013 sendiri merasakan adanya komunikasi yang masih terbatas antara pihak sekolah dengan pemerintah dalam hal sistem penilaian.

Untuk mengetahui sesungguhnya Implementasi Sistem Penilaian dalam Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru, maka penulis akan menjelaskan berdasarkan hasil wawancara yang telah didapat

## **METODE**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan penentuan informan pada Kasi Pengembangan SMA Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Kepala Sekolah SMAN 2 Pekanbaru, Wakil Kurikulum SMAN 2 Pekanbaru, Guru SMAN 2 Pekanbaru dan Siswa/i SMAN 2 Pekanbaru sesuai informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya observasi untuk melihat dan menganalisa kejadian-kejadian dilapangan, kemudian dengan menghubungkan wawancara, data atau laporan bertujuan untuk menggambarkan fenomena implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru, kemudian data diolah melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Sistem Penilaian dalam Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru**

Implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 ini melibatkan

semua komponen (*stakeholders*) termasuk komponen-komponen sistem pendidikan itu sendiri dalam proses pelaksanaannya. Lembaga pelaksana yang terlibat dalam sistem penilaian kurikulum 2013 ini sama halnya dengan lembaga pelaksana yang dilibatkan dalam implementasi kurikulum 2013 karena sistem penilaian disini merupakan bagian yang sangat penting dari kurikulum 2013. Lembaga pelaksana kurikulum 2013 secara nasional adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sementara ditingkat provinsi dan kabupaten/kota lembaga pelaksana kurikulum 2013 adalah Dinas Pendidikan dan pada tingkat mikro, lembaga pelaksana kurikulum 2013 adalah sekolah. Dalam hal inilah ketiga pelaksana dalam kurikulum 2013 tersebut juga turut andil atau terlibat dalam implementasi sistem penilaian kurikulum 2013 itu sendiri.

Sedangkan jika dilihat dari pelaksana sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di sekolah, dalam hal ini pelaksana sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di sekolah adalah guru, dikarenakan guru memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian sejauhmana perkembangan dan prestasi peserta didik terhadap pembelajaran selama ini yang telah peserta didik terima.

Selanjutnya sasaran dari implementasi ini juga merupakan hal mutlak yang harus diketahui sebelum kebijakan ini dijalankan, dalam hal ini sasaran dari implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 adalah peserta didik, dikarenakan untuk melihat keberhasilan tujuan suatu kurikulum dilihat dari

sejauhmana peserta didik dapat meningkatkan prestasi belajarnya namun tetap memperhatikan sikap yang dimilikinya. Dalam hal ini sistem penilaianlah yang dapat melihat sejauhmana perkembangan dari peserta didik karena guru melakukan penilaian kepada peserta didik secara menyeluruh baik dari segi pengetahuan, sikap dan juga keterampilan, yang dimana semuanya sangat berperan dalam upaya pembentukan dan pembinaan karakter siswa.

*Output* dari implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 ini adalah untuk mengukur sejauhmana perkembangan dan ketercapaian peserta didik baik dari segi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan sehingga nantinya dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter dalam konteks kehidupan nyata.

Sementara itu *outcome* dari implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 ini adalah menyiapkan peserta didik agar sukses menjalani kehidupannya dengan memiliki kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan, karena disini penilaian dilakukan secara komprehensif dimana tidak hanya bertumpu pada penilaian produk tetapi juga mempertimbangkan segi proses sehingga pada akhirnya akan menjadikan peserta didik sosok pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif dan afektif.

Mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn dalam **Agustino (2014:141)**

Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksanaan dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, yaitu :

### **1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Pemahaman tentang ukuran dan tujuan dari sistem penilaian dalam kurikulum 2013 pada dasarnya sangat penting. Implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 merupakan pelaksanaan kebijakan kurikulum 2013 dari segi sistem penilaian yang sangat memberikan pengaruh pada guru dan peserta didik disekolah. Implementasi pada sistem penilaian dalam kurikulum 2013 yang berhasil, bisa jadi mengalami kegagalan karena tidak jelasnya ukuran dan tujuan yang hendak di capai dari sistem penilaian tersebut.

Tujuan dari implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 ini adalah untuk mengetahui dan mengukur sejauhmana perkembangan peserta didik secara menyeluruh di lihat dari segi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan sehingga dapat mewujudkan peserta didik yang berkarakter dalam konteks kehidupan nyata. Untuk mencapai

tujuan tersebutlah maka diterapkannya tiga aspek penilaian tersebut dalam kurikulum 2013 ini.

Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, yang dimana pada hal ini terjadi pergeseran dari penilaian melalui tes (mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja), menuju penilaian autentik (mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil) dengan menggunakan PAP (Penilaian Acuan Patokan) yaitu pencapaian hasil belajar didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor Ideal (maksimal).

Penilaian tidak hanya pada level kompetensi dasar yaitu kompetensi yang terdiri dari sikap, keterampilan dan pengetahuan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik tetapi juga kompetensi inti (kompetensi yang didalamnya terdapat empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan dan penerapan pengetahuan) selain itu harus sesuai dengan standar kompetensi lulusan yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan *soft skills* dan *hard skills* yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan. Serta mendorong pemanfaatan portofolio yang dibuat peserta didik sebagai instrumen utama penilaian.

Selain itu *Standar Operating Procedure* (SOP) yang jelas sangat dibutuhkan dalam implementasi suatu kebijakan, karena SOP merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai

dengan standar yang ditetapkan. Sehingga dalam hal ini implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja yang baik pula.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam mengimplementasikan sistem penilaian dalam kurikulum 2013 standar dan tujuan haruslah jelas. Tujuan dan standar penilaian dari sistem penilaian dalam kurikulum 2013 harus disosialisasikan kepada seluruh perangkat sekolah dan guru yang mengajar di SMA Negeri 2 Pekanbaru. Akan tetapi pada kenyataannya sosialisasi tentang tujuan dan standar sistem penilaian dalam kurikulum 2013 hanya dilakukan satu kali sebelum kurikulum 2013 tersebut diimplementasikan dan juga hanya pada guru-guru mata pelajaran wajib yang mendapatkan pelatihan.

Kemudian SMA Negeri 2 Pekanbaru harus membuat *Standart Operating Procedure* (SOP) yang akan dijadikan pedoman bagi perangkat sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 termasuk dalam hal sistem penilaian, karena sistem penilaian dalam kurikulum 2013 merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam implementasi kurikulum 2013 dalam mengukur sejauh mana perkembangan peserta didik. Akan tetapi, SMA Negeri 2 Pekanbaru belum membuat *Standart Operating Procedure* (SOP) sehingga pada kenyataannya implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 belum berjalan baik dan lancar sesuai dengan standar dan tujuan yang diinginkan karena di dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kesalahpahaman, kebingungan serta perubahan dalam standar penilaian.

## 2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia berupa guru sebagai tenaga pengajar yang berkompentensi.
2. Sumber daya waktu berupa sosialisasi tentang sistem penilaian dalam kurikulum 2013.
3. Sumber daya finansial berupa dana yang dibutuhkan untuk menunjang proses implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di sekolah.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk mengimplementasikan sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru membutuhkan sumber daya manusia berupa guru yang berkompentensi, dimana memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik dan handal untuk memahami sesungguhnya bagaimana standar dalam sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Akan tetapi pada kenyataannya jumlah guru yang belum lulus Ujian Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan masih tergolong cukup banyak yaitu berjumlah 40 orang guru, dimana sebagian besar dari jumlah guru yang ada sehingga masih ditemukan banyak guru di SMA Negeri 2 Pekanbaru yang belum mengerti dengan jelas cara penilaian serta standar dalam implementasi kurikulum 2013.

Waktu sosialisasi yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum 2013

termasuk dalam hal segi sistem penilaiannya adalah selama tujuh tahun yaitu mulai dari tahun ajaran 2013/2014 sampai dengan tahun 2019/2020. Akan tetapi pada kenyataannya sosialisasi kepada peserta didik di SMA Negeri 2 Pekanbaru hanya diberikan sebanyak satu kali menjelang tahap uji coba kurikulum 2013 sehingga masih banyak peserta didik yang belum paham tentang standar penilaian dalam kurikulum 2013 dikarenakan sosialisasi yang di lakukan belum maksimal.

Dana yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum 2013 disediakan langsung oleh pemerintah yang berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota. Akan tetapi pada kenyataannya dana yang diberikan oleh pemerintah tersebut hanya berupa pembelian buku panduan untuk guru dan peserta didik, sedangkan dalam implementasi sistem penilaian ini banyak hal yang masih dibutuhkan dimana peserta didik selain membuat sendiri beberapa instrumen penilaian selanjutnya juga membutuhkan alat peraga sebagai penunjang proses belajar yang dimana nantinya keseluruhan tersebut dibutuhkan dalam melakukan penilaian kepada peserta didik. Namun kenyataannya peserta didik harus membuat beberapa instrumen penilaian dan sarana pendukung belajar sendiri seperti alat peraga dan biaya lebih banyak dibebankan kepada sekolah dan peserta didik.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan

terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

Organisasi formal yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 termasuk di dalamnya dari segi sistem penilaian untuk sekolah dasar dan menengah di Kota Pekanbaru adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang merupakan pelaksana kebijakan yang mengurus semua hal yang berkaitan dengan kurikulum 2013 ditingkat kabupaten/kota. Namun dalam pelaksanaannya kewenangan untuk mengurus tentang kurikulum bagi Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah bagian Seksi Pengembangan SMA.

Organisasi non formal yang terlibat dalam implementasi kurikulum 2013 termasuk di dalamnya dalam implementasi segi sistem penilaian adalah Komite Sekolah yang terdiri dari orang tua peserta didik sebagai pendukung finansial dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kewajiban atau tugas Kepala Seksi Pengembangan SMA dalam bidang kurikulum pada sekolah adalah Adapun kewajiban atau tugas Kepala Seksi Pengembangan SMA dalam bidang kurikulum adalah melakukan *monitoring* dan penilaian terhadap sekolah-sekolah yang telah menjalankan kurikulum 2013 untuk melihat berbagai kendala yang terjadi yang tidak bisa di selesaikan oleh sekolah, sehingga pihak dinas akan memberikan solusi serta jalan keluarnya.

Komite sangat berperan dalam berbagai kegiatan yang terjadi di sekolah dikarenakan komite disini adalah menjembatani sekolah dengan masyarakat, dengan cara mencari dana kepada masyarakat terhadap berbagai peluang yang nantinya akan mendatangkan dana untuk penerapan kurikulum 2013 di sekolah termasuk didalamnya dana yang diperlukan untuk sistem penilaian dalam kurikulum 2013 kepada peserta didik dengan menggunakan banyak media pembelajaran dan instrumen penilaian, maka dari itu komite memiliki peran yang sangat penting demi terwujudnya implementasi kurikulum 2013 yang baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

#### **4. Sikap/Kecenderungan**

##### ***(Disposition) Para Pelaksana***

Sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 karena dapat dilihat seberapa demokratis, antusias dan responsif agen pelaksana terhadap kelompok sasaran dan lingkungan.

Dalam hal ini unsur yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan agen pelaksana untuk mengimplementasikan sistem penilaian dalam kurikulum 2013 adalah sejauh mana pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan atau program yang akan dilaksanakan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru, pelaksana sistem penilaian yaitu guru harus memahami standar dan tujuan dari sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Akan tetapi pada kenyataannya

masih banyak guru sebagai pelaksana sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru yang belum memahami standar dan tujuan dari implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013.

Selanjutnya setelah standar dan tujuan dapat dipahami oleh pelaksana sistem penilaian dalam kurikulum 2013, maka pelaksana akan dapat menerima sistem penilaian dalam kurikulum 2013 tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaksana sistem penilaian dalam kurikulum 2013 yaitu guru yang mengeluhkan dengan sistem penilaian yang membingungkan dan menyulitkan dengan disertai instrumen penilaian yang cukup banyak. Dalam hal ini dapat diartikan implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru secara tidak langsung mendapatkan penolakan dari guru sebagai pelaksana sistem penilaian dalam kurikulum 2013 sehingga respon dan antusias yang baik dari pelaksanaan penilaian ini belum didapatkan.

##### **5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Menurut Van Metter dan Van Horn komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana disini berupa koordinasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa bahwa komunikasi antar organisasi terkait implementasi sistem

penilaian dalam kurikulum 2013 dapat disampaikan dalam bentuk sosialisasi berupa pemberian pendidikan dan pelatihan kepada para guru sebagai pelaksana sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di tingkat sekolah. Selain itu perubahan yang dilakukan oleh pemerintah sebaiknya dapat diberitahu atau disosialisasikan terlebih dahulu karena komunikasi antar organisasi pelaksana yang baik akan mewujudkan lancarnya implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 sampai ke tingkat pelaksana paling bawah yaitu sekolah. Oleh karena itu, standar dari sistem penilaian dalam kurikulum 2013 yang diberikan harus konsisten dan jelas.

Akan tetapi pada kenyataannya sosialisasi yang dilakukan berupa pelatihan kepada guru di Kota Pekanbaru termasuk guru di SMA Negeri 2 Pekanbaru hanya dilakukan satu kali menjelang tahap pelaksanaan kurikulum 2013 termasuk didalamnya pelaksanaan dalam sistem penilaiannya. Kemudian pemerintah melakukan perubahan secara mendadak dalam skala penilaian setelah sekolah menerapkan empat semester kurikulum 2013. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya sosialisasi yang diberikan serta masih terbatasnya atau tidak lancarnya komunikasi yang terjalin antara pemerintah pusat dengan pihak sekolah di SMA Negeri 2 Pekanbaru sehingga informasi mengenai perubahan dalam sistem penilaian kurikulum 2013 yang terjadi selalu diketahui pihak sekolah dengan cara mendadak.

## **6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan untuk menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan dari kinerja implementasi kebijakan, karena itu mengimplementasikan kebijakan harus juga memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru juga memerlukan ekonomi orang tua peserta yang memadai sehingga dapat mendorong anaknya dalam menyediakan sarana pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum 2013 di sekolah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang tua siswa SMA Negeri 2 Pekanbaru memiliki ekonomi yang memadai, namun masih banyak juga yang memiliki ekonomi menengah ke bawah sehingga bagi orang tua siswa yang memiliki ekonomi menengah ke bawah banyak mengeluarkan dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pembelajaran dan penilaian dalam kurikulum 2013. Selain ekonomi, lingkungan sosial berupa pola pikir orang tua peserta didik yang mendorong dalam dunia pendidikan bagi anaknya juga sangat dibutuhkan dalam implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 ini. Akan tetapi pada kenyataannya pemikiran orang

tua peserta didik masih ada yang terkesan acuh tak acuh dengan pendidikan anaknya sehingga menyebabkan jika si anak meminta biaya lebih untuk pembelajaran dan penilaiannya masih ada orang tua yang mengeluhkan karena harus mengeluarkan biaya tersebut.

## **B.Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru**

Implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Penulis selain membahas bagaimana implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013, juga meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Sistem Penilaian dalam Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian Implementasi Sistem Penilaian dalam Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru yaitu :

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh sebab itu dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan adanya sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Sumber daya manusia di sini adalah kompetensi guru dalam mengimplementasikan sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Namun dalam melaksanakan Sistem Penilaian dalam Kurikulum 2013 ini

sumber daya manusia masih belum memadai yakni guru yang berusia di atas 50 tahun lebih mendominasi yaitu sekitar 40 orang, dalam hal ini guru yang berusia produktif dan memiliki kompetensi yang cukup sangat minim sehingga sebagian besar guru yang telah cukup umur merasa kesulitan memahami sistem penilaian dalam kurikulum 2013 sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

## **2. Sikap dari Pelaksana dan Sasaran Kebijakan**

Sikap pelaksana dan sasaran kebijakan merupakan hal penting dalam pelaksanaan kebijakan apabila suatu kebijakan dirancang dengan baik namun terdapat sikap penolakan dari agen pelaksana dan sasaran kebijakan maka akan sulit mencapai tujuan dari kebijakan tersebut dengan maksimal.

Akan tetapi pada kenyataannya masih terjadi sikap penolakan dari guru sebagai pelaksana sistem penilaian dalam kurikulum 2013 dikarenakan aspek penilaian serta instrumen penilaian yang cukup banyak dan rumit dalam sistem penilaian kurikulum 2013 sehingga membuat para guru merasa kesulitan dan kerepotan dikarenakan jumlah peserta didik yang banyak dalam satu kelas.

## **3. Komunikasi Antar Pelaksana**

Komunikasi yang terjalin antara para pelaksana juga faktor pendukung dalam implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013, untuk melaksanakan sistem penilaian dalam kurikulum 2013 ini diperlukannya komunikasi yang terjalin baik dan lancar seperti tersedianya suatu *blog* atau tempat bertanya *online* dalam

suatu grup yang nantinya jika terjadi perubahan segala sesuatu tentang peraturan dalam sistem penilaian dapat diketahui secara cepat dan mendetail. Namun pada kenyataannya masih terbatasnya komunikasi yang terjalin antara para pelaksana kebijakan kurikulum 2013 dari pemerintah pusat sampai kepada pihak sekolah dalam skala penilaian rapor.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Implementasi Sistem Penilaian dalam Kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru belum dapat diimplementasikan dengan baik dan optimal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru belum berjalan dengan baik, yaitu sumber daya manusia yang belum memadai. Selanjutnya sikap dari pelaksana dan sasaran kebijakan yang masih terjadi penolakan, dan terakhir masih terjalannya komunikasi yang terbatas antara pemerintah pusat dan pihak sekolah dalam skala penilaian rapor yang selalu mengalami perubahan secara mendadak.

## **SARAN**

1. Implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru untuk kedepannya lebih di optimalkan dan maksimalkan lagi agar tujuan dari implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 ini dapat

tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Para guru sebagai pelaksana sistem penilaian hendaknya dapat memahami dengan jelas standar sistem penilaian dalam kurikulum 2013 sehingga nantinya agar dapat menghasilkan para implementor yang memiliki kompetensi yang handal. Selanjutnya organisasi yang terlibat dalam implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2013 ini sebaiknya lebih mengoptimalkan lagi usahanya demi mewujudkan lancarnya pelaksanaan sistem penilaian dalam kurikulum 2013 di SMA Negeri 2 Pekanbaru sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi sistem penilaian dalam kurikulum 2012 di SMA Negeri 2 Pekanbaru seperti pelatihan bagi guru dapat dimaksimalkan lagi untuk kedepannya agar implementor sistem penilaian dalam kurikulum 2013 memahami dengan jelas standar yang telah ditetapkan serta lebih berkompeten dalam bidang mengajarnya dan siap dalam mengimplementasikan sistem penilaian dalam kurikulum 2013. Selain itu hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi yang berulang secara optimal yang dimana sosialisasi tidak hanya diberikan pada guru tetapi juga pada peserta didik sebagai sasaran dari implementasi ini. Kemudian pemerintah hendaknya menjalin komunikasi yang lancar dengan sekolah serta berbagai pelaksana kurikulum 2013 agar keterbatasan

komunikasi yang saat ini timbul tidak terulang kembali. Serta yang terakhir pemerintah hendaknya melakukan pembakuan peraturan tentang sistem penilaian dalam kurikulum 2013 yang selalu mengalami perubahan karena dalam hal ini penerapan secara konsisten sangat diharapkan agar tujuan dan alasan pemerintah mengembangkan kurikulum baru ini dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Alfabeta: Bandung.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2014. *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 2014/2015*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan. 2014. *Konsep Penilaian Autentik pada Proses dan hasil belajar*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Jakarta.
- Fathurrohman, Muhammad. 2015. *Paradigma Pembelajaran Kurikulum 2013 (Strategi Alternatif Pembelajaran di Era Global)*. Kalimedia: Sleman Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic policy Analisis)*. Gava Media: Yogyakarta.

- Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kurniasih, Imas dan Berlin Sani. 2014. *Sukses Mengimplementasikan Kurikulum 2013 (Memahami Berbagai Aspek dalam Kurikulum 2013)*. Kata Pena: Jakarta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. 2013. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. PT.Elek Media Komputindo: Jakarta.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Alfabeta: Bandung.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktik*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama: Jakarta.
- Wahab, Abdul, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Wibowo, Eddi dkk. 2004. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia: Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.
- Dokumen**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Jurnal**
- Eftwory, Cesno. 2016. *Implementasi Kurikulum 2013 pada Sekolah Dasar di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Koto Provinsi Sumatera Barat*. Jom Fisip Volume 3 No. 1 – Februari 2016.
- Gempita, Rereantina. 2015. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Studi*

*Tentang Upaya Pelaksanaan Kurikulum 2013 Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru).*  
Jom Fisip Volume 2 No. 1 -  
Februari 2015.

### **Sumber Elektronik**

Sudrajat, Akhmad. 2008. Penilaian Pembelajaran Siswa dalam KTSP.

(<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/07/17/penilaian-pembelajaran-siswa-dalam-ktsp/>, di akses pada tanggal 25 Februari 2016, pukul 20.15 WIB).

News, Detik. 2014. Ada 6.221 sekolah yang akan menjadi percontohan kurikulum 2013. (<http://m.detik.com/news/berita/2769331/mendidbud-ada-6221-sekolah-yang-akan-menjadi-percontohan-kurikulum-2013/>, di akses pada tanggal 8 Maret 2016, pukul 19.53 WIB).

Satriani, Ilmal. 2014. Arah Kebijakan Kurikulum Masa Depan. ([http://www.academia.edu/4608321/Arah\\_Kebijakan\\_Kurikulum\\_Masa\\_Depan\\_Analisis\\_Kebijakan\\_Kurikulum\\_2013](http://www.academia.edu/4608321/Arah_Kebijakan_Kurikulum_Masa_Depan_Analisis_Kebijakan_Kurikulum_2013), di akses pada tanggal 13 April 2016, pukul 17.00 WIB)